

MANAJEMEN AQUABISNIS: DIDEFINISIKAN SBG KEGIATAN USAHA BISNIS DGN KOMODITIS BERUPA IKAN DAN PRODUK OLAHANNYA SERTA BARANG DAN JASA PENDUKUNG LAINNYA (BIDANG PENANGKAPAN, BUDIDAYA, PENGOLAHAN)

1. BUSINESS PLAN WITHOUT MISTAKE & RISK: perencanaan usaha perikanan yg baik tanpa kesalahan dan resiko sekecil mungkin

2. BUSINESS PLAN FINANCE SOURCE AQUACULTURE POTENTIAL & INVESTORS

Kegiatan agribisnis perikanan mencakup produksi komoditas perikanan, pengadaan sarana dan prasarana produksi

Bhn Kuliah Dr,Ir,Istiyanto Samidjan,MS dlm mk Manajemen Akuabisnis

Menejemen aquabisnis : Meliputi kegiatan POAC (Planning Organizing Actuating Controlling)

Planning: Perencanaan bisnis akuaculture yang prospektif & nilai ekonois & peluang ekspor, berbasis tenaa lokal dan padat karya, teknologi madya/sederhana

Organizing: agar jenis usaha akuakultur berjalan baik maka perlu pembentukan organisasi yg baik dari direktur, kepala biro/bidang, superfisi, tenaga karyawan harus terwujud dan sistematk, serta jenis badan: CV, PT, perusahaan lainnya

Actuating: dalam pelaksanaan harus mudah di kontrol, jelas ouputnya, muah dikerjakan, dari sisi menejemen mudah di awasi, pekerjaan berjalan lancar dan menguntungkan serta kualitas produk baik dan standart

CONTROLLING: Mudah dalam pengawasan, hasilnya terkontrol dan berkualitas. Pengawasan dilakukan dalam bidang keuangan, produksi, menejemen, dan administrasi, shg pd akir kegiatan semua berjalan baik.

SUMBERDAYA MANUSIA : Pelaku usaha perikanan di Indonesia terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan pengolah hasil perikanan dan seluruh pelaku yang terlibat dalam usaha pendukung perikanan seperti : industri pakan, benih, bahan bakar, peralatan perikanan tangkap, akuakultur, pengolahan hasil perikanan, obat-obatan serta kapal perikanan. Mereka semua terlibat dalam kegiatan usaha MANUFAKTUR (SEKTOR RIIL).

Tdk lulus sd, smp, sma, PT

Pengalaman kerja: dari nol (0) s/d 60 th

Nelayan domisili: Pesisir dan Pulau-pulau kecil: mt pencarian: Laut, perairan umum, rawa, danau, sungai besar.
 Pembudidaya: tambak, kolam, hatchery,
 Pengolah: disentra perikanan (penangkapan & budidaya)

Jumlah Nelayan Indonesia bisnis penangkapan ikan

TABEL 1.8. JUMLAH NELAYAN PERIKANAN LAUT DAN PERAIRAN UMUM DI INDONESIA PADA TAHUN 2003

No.	Provinsi	Nelayan (orang)	
		Perikanan Laut	Perairan Umum
1	D.I. Aceh	134.679	7.821
2	Sumatera Utara	120.719	16.534
3	Riau	205.406	29.077
4	Jambi	15.036	19.678
5	Sumatera Barat	32.221	24.766
6	Sumatera Selatan	29.120	66.133
7	Bengkulu	18.924	8.975
8	Lampung	54.062	19.412
9	Bangka Belitung	52.518	-
10	DKI Jakarta	217.327	-
11	Banten	19.510	1.304
12	Jawa Barat	108.211	42.432
13	Jawa Tengah	303.648	41.001
14	D.I. Yogyakarta	4.016	2.381
15	Jawa Timur	613.668	33.272
16	Bali	37.240	5.258
17	Nusa Tenggara Barat	46.603	5.943
18	Nusa Tenggara Timur	136.550	1.363
19	Kalimantan Barat	58.781	25.609
20	Kalimantan Tengah	38.206	36.032
21	Kalimantan Selatan	56.759	85.362
22	Kalimantan Timur	38.204	27.673
23	Sulawesi Selatan	206.368	15.411
24	Sulawesi Tenggara	107.590	3.536
25	Sulawesi Utara	127.479	4.075
26	Sulawesi Tengah	117.154	668
27	Gorontalo	15.125	2.068
28	Maluku	105.660	97
29	Maluku Utara	50.925	-
30	Papua	240.112	19.905
	Jumlah	3.311.821	545.786

JENIS USAHA PENANGKAPAN IKAN:

- 1. Jumlah nelayan Indonesia perikanan laut 3.311.821 orang
- 2. Perairan umum jml nel 545.786 orang

Usaha yg menguntungkan

BISNIS PENANGKAPAN IKAN DUNIA JUMALH NELAYAN 37.795.000 ORANG
SANGAT POTENSIAL DIKEMBANGKAN



TABEL 1.9. JUMLAH NELAYAN DI DUNIA PADA TAHUN 1990—2002
(DALAM RIBUAN)

Benua	1990	1995	2000	2001	2002
Afrika	1.917	2.238	2.585	2.640	2.615
Amerika Utara dan Tengah	767	770	751	765	762
Amerika Selatan	769	814	784	760	770
Asia	23.654	28.552	30.770	31.493	32.821
Eropa	654	864	821	796	746
Oseania	74	76	86	80	81
Dunia	27.835	33.314	35.797	36.534	37.795

Sumber: FAO, 2004

TABEL 1.10. JUMLAH PEMBUDIDAYA IKAN DI INDONESIA BERDASAR-
KAN SISTEM AKUAKULTUR TAHUN 2002

No.	Provinsi	Jumlah Pembudidaya (orang)					
		Budi Daya Laut	Budi Daya Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah
1	DI Aceh	-	25.765	8.963	65	-	12.303
2	Sumatera Utara	1.957	3.438	18.782	553	1.165	56.799
3	Riau	3.399	1.231	19.612	6.926	-	24
4	Jambi	-	1.726	18.691	2.092	1.822	605
5	Sumatera Barat	-	2	85.003	1.882	1.439	8.854
6	Sumatera Selatan	-	788	419	7.993	-	20.147
7	Bengkulu	-	139	1.204	77	-	5.270
8	Lampung	742	43.913	26.222	1.762	229	13.162
9	Bangka Belitung	72	252	126	-	1.466	-
10	DKI Jakarta	-	-	5.995	-	-	-
11	Banten	-	5.319	11.603	537	15	24.263
12	Jawa Barat	-	32.468	499.456	2.963	3	187.159
13	Jawa Tengah	-	48.836	308.353	4.861	-	55.008
14	DI Yogyakarta	-	-	52.276	352	-	19.929
15	Jawa Timur	-	46.163	114.123	2.197	-	70.662
16	Bali	16.354	729	8.128	-	167	21.139
17	Nusa Tenggara Barat	1.633	14.815	5.162	-	-	2.182
18	Nusa Tenggara Timur	9.163	942	13.467	-	-	2.422
19	Kalimantan Barat	-	2.571	8.971	1.583	5	-
20	Kalimantan Tengah	-	521	459	2.652	-	-
21	Kalimantan Selatan	839	2.905	3.380	6.027	22	742
22	Kalimantan Timur	-	15.262	2.269	11.369	-	-
23	Sulawesi Selatan	-	82.038	4.737	-	-	20.167
24	Sulawesi Tenggara	24.111	7.940	2.884	-	-	-
25	Sulawesi Utara	4.695	129	4.625	849	-	17.526
26	Sulawesi Tengah	-	3.363	4.719	19	-	484
27	Gorontalo	2.659	-	659	38	2.321	5
28	Maluku	-	15	28	-	-	-
29	Maluku Utara	-	40	79	-	46	-
30	Papua	-	11.565	18.508	413	-	-
	Jumlah	65.624	352.875	1.248.903	55.210	8.700	538.852

TABEL 1.11. JUMLAH PEMBUDIDAYA DI DUNIA PADA TAHUN 1990—2002 (DALAM RIBUAN)

Benua	1990	1995	2000	2001	2002
Afrika	— ¹⁾	105	112	115	111
Amerika Utara dan Tengah	53	74	74	69	65
Amerika Selatan	16	88	92	92	93
Asia	3.698	6.003	8.503	8.720	9.502
Europa	11	36	37	39	39
Oseania	—	1	5	5	5
Dunia	3.778	6.307	8.823	9.040	9.815

Sumber: FAO, 2004.

Keterangan: ¹⁾ tidak ada data

Selain sumber daya manusia yang berkecimpung dalam perikanan tangkap dan akuakultur, ada juga yang terlibat dalam pengolahan ikan, pembenihan ikan, agen pakan, pupuk, obat-obatan, pestisida, BBM, peralatan penangkapan ikan dan akuakultur, jasa, serta birokrasi. Keberadaan tenaga kerja pengolahan perikanan tergantung kepada jenis usaha, yaitu pengolahan rakyat atau perusahaan. Usaha pengolahan rakyat seperti pengeringan, pengasinan, pendendengan, pengasapan, dan pemin-dangan biasanya berlangsung di sekitar kawasan tempat pendaratan ikan atau sentra produksi perikanan tangkap dan akuakultur. Usaha ini biasanya dimiliki oleh para juragan kapal atau investor dari luar kawasan tersebut.

Perusahaan pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan (*cold storage*), dan pabrik makanan biasanya berlokasi relatif agak jauh dari tempat pendaratan ikan atau sentra produksi perikanan tangkap dan akuakultur. Beberapa pabrik pengolahan perikanan yang memproduksi makanan siap saji atau siap masak, seperti sosis, *burger*, bakso, dan *nugget*, berlokasi di Pulo Gadung-Jakarta dengan bahan baku berupa *fillet* ikan patin dari Bogor dan Cianjur. Pegawai perusahaan tersebut berasal dari lokasi pabrik atau merekrut tenaga berpendidikan tinggi dari luar lokasi.

TABEL 1.12. PRODUKSI PERIKANAN DUNIA DAN PEMANFAATANNYA PADA TAHUN 1999—2003 (JUTA TON)

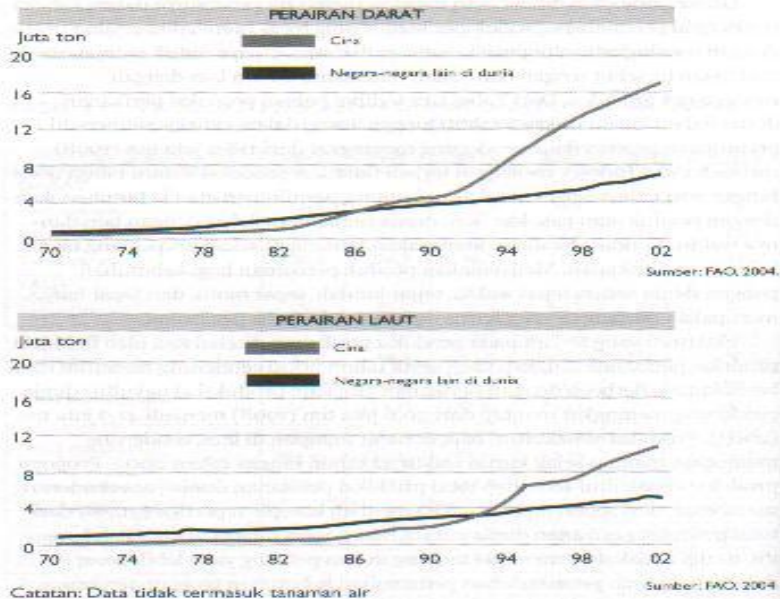
Produksi	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ¹⁾
DARAT						
Penangkapan	8,1	8,5	8,7	8,7	8,7	9,0
Akuakultur	18,5	20,2	21,3	22,5	23,9	25,2
Total darat	26,6	28,7	30,0	31,2	32,6	34,2
LAUT						
Penangkapan	79,6	85,2	86,8	84,2	84,5	81,3
Akuakultur	12,0	13,3	14,2	15,2	15,9	16,7
Total laut	91,6	98,5	101,0	99,4	100,4	98,0
Total penangkapan	87,7 (74,2)	93,8 (73,7)	95,5 (72,9)	92,9 (71,1)	93,2 (70,1)	90,3 (68,3)
Total akuakultur	30,6 (25,8)	33,4 (26,3)	35,5 (27,1)	37,8 (28,9)	39,8 (29,9)	41,9 (31,7)
Total perikanan dunia	118,2	127,2	131,0	130,7	133,0	132,2
PEMANFAATAN						
Konsumsi manusia	93,6	95,4	96,8	99,5	100,7	103,0
Bukan pangan	24,6	31,8	34,2	31,1	32,2	29,2
Populasi (milyar)	5,9	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3
Suplai ikan per kapita (kg)	15,8	15,9	15,9	16,2	16,2	16,3

Catatan: tidak termasuk tanaman air

¹⁾ Estimasi

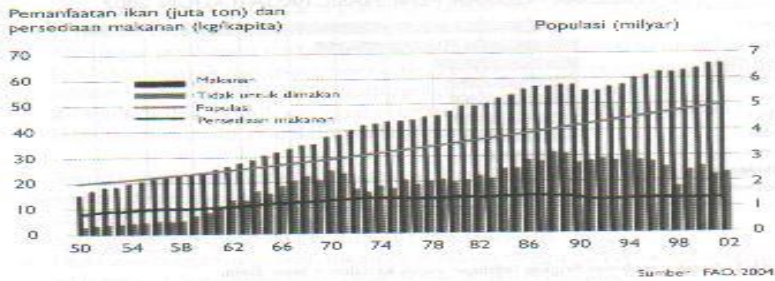
Sumber: FAO, 2004.

PRODUKSI BUDI DAYA DI PERAIRAN DARAT DAN LAUT



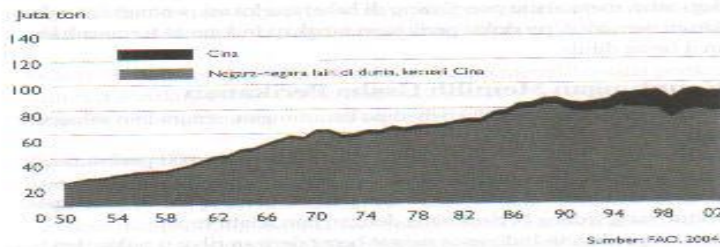
Grifik 2. Produksi akuakultur, baik di darat maupun di laut. Cenderung meningkat sejak kurun waktu 32 tahun hingga tahun 2002

PEMANFAATAN DAN PERSEDIaan IKAN DUNIA, TIDAK TERMASUK CINA



Grifik 3. Jarak (gap) antara populasi penduduk dan pasokan ikan dunia yang semakin melebar. Merupakan tantangan sekaligus peluang usaha perikanan

PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DUNIA



Grifik 4. Produksi perikanan tangkap mengalami kemundakan (level off) sejak tahun 1980-an



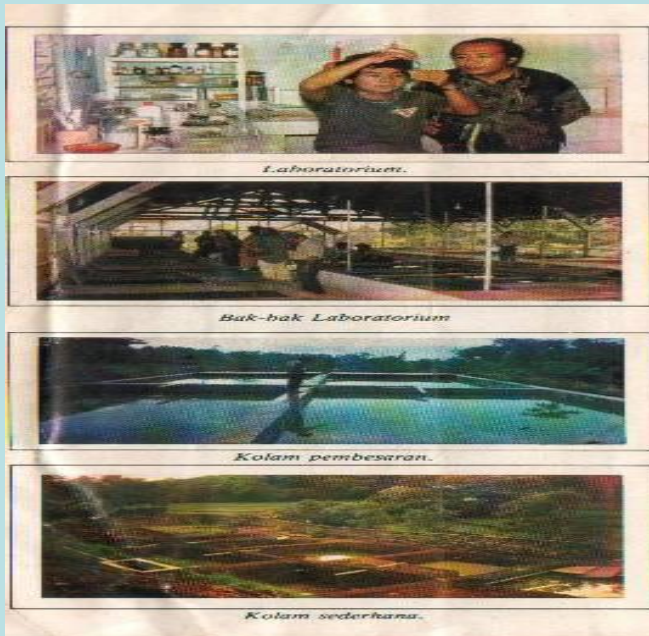
Grafik 5. Produksi perikanan tangkap Indonesia masuk ke dalam 4 besar dunia

MSY disebut tangkap lebih (*overfishing*). Beberapa kawasan seperti Selat Malaka, Laut Jawa, dan laut di selatan Pulau Sulawesi, kegiatan perikanan tangkap telah mengalami *overfishing* di beberapa lokasi penangkapan ikan. Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap Indonesia termasuk ke dalam 4 besar dunia.

D. Keuntungan Memilih Usaha Perikanan

Usaha perikanan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Ikan sebagai makanan sehat untuk dikonsumsi memiliki permintaan yang cenderung meningkat.
- 2) Perikanan, terutama akuakultur dan pengolahan perikanan, merupakan sektor yang sedang berkembang dengan laju relatif cepat.
- 3) Potensi perikanan Indonesia sangat besar dengan ribuan pulau dan luasnya lautan, termasuk keragaman hayati yang besar sehingga lebih banyak pilihan tipe, komoditas, dan lokasi usaha perikanan.
- 4) Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak merupakan pasar potensial yang baru digali sebagian kecil saja sehingga peluang pengembangan pasar masih sangat terbuka.



CV. Tirta Unggul:

Presiden direktur,
Manager,
kepala produksi,
staf: teknisi,
administrasi

Kegiatan:
pembenihan dan
pembesaran ikan lele
dumbo



Jenis usaha
 Pembenihan
 Ikan lele
 Dumbo:

1. Secara buatan: hipofise
2. Alami

SISTEM AGRIBISNIS INTEGRASI SECARA VERTIKAL:

Kajian secara vertikal keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku yang terlibat dlm sistem komoditas tsb mulai dari produsen/penyedia input/sarana produksi perikanan/pertanian, distributor input/sarana produksi perikanan/pertanian, usaha petambak/petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, usaha pengolahan hasil perikanan(agroindustri), pedagang pengecer, ekportir, sampai konsumen domestik, luar negeri.



SISTEM AGRIBISNIS INTEGRASI SECARA HORIZONTAL :

Sistem terselenggara apabila keterkaitan antar lini komoditas pd tingkat usaha yg sama atau antar pelaku dlm suatu komoditas yg sama. Integrasi tercipta kuat apll beberapa perusahaan dlm suatu tingkat skala usaha menggunakan bhn baku yg sama atau menggunakan peralatan produksi yg sama utk menghasilkan beberapa jenis produk.: misalnya strategi memperpanjang atau memperpendek lini produk, menambah atau mengurangi lebar produk atau menambah atau mengurangi lebar produk atau menambah atau mngurangi kedalaman produk

AGRIBISNIS PERIKANAN MENGANDUNG KELEMAHAN DAN RESIKO YAITU:

1. Masih tingginya faktor alam (musim dan lingkungan) yg bisa mempengaruhi produksi, terutama pd level on farm.
2. Fluktuasi harga yg disebabkan oleh tingginya faktor alam serta sifat produk perikanan yg mudah busuk dan voluminous.
3. Aksesibilitas permodalan bagi sektor ini, terutama untuk skala KECIL dan massal masih rendah.
4. Agribisnis perikanan umumnya bersifat usaha keluarga sehingga sering kali tidak terdapat pemisahan pengelolaan keuangan usaha dengan keluarga. Terjadi intervensi yang sangat kuat dlm pengambilan keputusan usaha oleh keluarga (suami, isteri, anak dan sebagainya).

Tipe, komoditas dan skala usaha perikanan sangat banyak: agribisnis perikanan banyak pelaku: on farm, off farm, mis perikanan tangkap, akuakultur, pengolahan

Perikanan adl sektor usaha yg sedang tumbuh: diversifikasi dan improvisasi produk pengolahan perikanan bisa menjadi penghela usaha perikanan tangkap dan akuakultur.

Menghasilkan komoditi ekspor dg bhn baku dan tenaga lokal-murah mis: rumput laut kering (psr ekspor, lokal, regeonal (usaha budidaya rumput laut)

BISNIS PERIKANAN DI JAWA TENGAH BERBASIS PADA UKM BIDANG PERIKANAN

Dua gubernur akan mendeklarasikan kebangkitan UKM

maimen dan harapannya terhadap pengembangan UKM di wilayahnya masing-masing.

"Deklarasi ini kami harapkan menjadi tonggak bergeraknya aktivitas kewirausahaan Jawa Tengah, sehingga UKM benar-benar bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi Jawa Tengah," jelas Le Solichedi, koordinator Rakit Usaha.

Upaya untuk memobilisasikan kegiatan ini dilakukan bukan hanya di lingkup Jawa Tengah, bahkan sudah ditonjolkan hingga tingkat pusat. Bappenas bahkan menyatakan sangat mengapresiasi program ini, dan akan mengupayakan untuk mengadopsinya sebagai model pengembangan UKM secara nasional.

Solichedi menjelaskan bahwa Rakit Usaha bukan lagi program seremonial atau program wacana, tapi program riil, yang hasilnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Jawa Tengah. "Substansi kegiatan ini mencakup mental, teknis, dan manajerial. Mental ditujukan bagi semua calon wirausaha, technical dan managerial ditujukan bagi semua wirausaha pemula dan wirausaha yang sudah eksekusi," jelas Solichedi.

Kegiatan yang direncanakan berkesinambungan hingga 2018 ini, memang disiapkan untuk memacu pembangunan mental wirausaha dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan UKM di Jawa Tengah. Kegiatan penerjemahan produk-produk UKM seperti franchise expo, expo UMKM, festival kuliner, pameran butik dll, adalah upaya kegiatan ini untuk mengkonsolidasi pelaku UKM dengan pasar konsumennya. Sementara workshop yang bertema Business Start

Up Model adalah upaya memberikan edukasi ke mereka yang baru memulai bisnis tentang berbagai cara memulai sebuah usaha.

Sementara aspek penciptaan akses ke lembaga permodalan juga digelar di rangkaian kegiatan Rakit Usaha ini dalam acara Jambore Keuangan Mikro. "Di sini bukan hanya memberikan edukasi tentang pemodalannya, tapi sekaligus memberikan peluang akses bagi UKM untuk berhubungan langsung dengan lembaga keuangan mikro," tambah Solichedi.

Gerakan semua elemen dengan mengambil titik "gerakan" maka Kaldu berusaha melibatkan semua elemen masyarakat seperti perguruan tinggi, asosiasi bisnis, LSM, media massa hingga ke lembaga-lembaga keuangan mikro. "Target kegiatan ini cukup besar, salah satunya adalah berdirinya UKM center dari Akademi Kewirausahaan Jawa Tengah, dengan komitmen yang dinyatakan oleh semua elemen ini, target ini insya Allah terwujud" tandas Solichedi.

Diharapkan bahwa bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Rakit Usaha ini bisa menghubungi Sekretaris Kaldu di Gedung IDC lantai 2 Jl Imam Bonjol 154-160 Semarang atau telepon (024) 3552735, atau email ke swacoordinator@solico.com. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan hingga 2018 ini akan menampung semua ide dan aspirasi masyarakat yang kreatif, sehingga benar-benar bisa dijadikan acuan untuk pengembangan UKM di Jawa Tengah.

Pembekalan Andrei Wongso Sempat terhalang gerakan perbukitan kewirausahaan Jawa Tengah ini, ternyata juga dibantu dari motivator nomor 1 Indonesia Andrei Wongso. Pada sesi terakhir deklarasi Rakit Usaha ini, Andrei Wongso akan memberikan pembekalan kepada se-

luruh peserta tentang bagaimana sikap mental wirausaha. Andrei Wongso akan memotivasi 1.500 peserta di tiga kota ini dengan pengalaman-pengalamannya bagaimana ia berhasil menjadi seorang wirausaha besar di Indonesia.

Di sela-sela padatnya jadwal kegiatan motivator terencana ini, ia me-mang-sebagai menyempatkan untuk hadir di acara ini. Bahkan menurut starinya, Andrei Wongso harus memodela permintaan-permintaan konsepsi di beberapa kota. "Pak Andrei sangat bersemangat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dunia usaha," kata Lemi, starinya.

Menanggapi sambutan ini, Solichedi menjelaskan bahwa respons simpati ini memang datang dari berbagai kalangan. Bahkan Ketua Kadu Nasional MS Hilayat menyatakan akan hadir di acara deklarasi Rakit Usaha ini. Bahkan kabarnya Bappenas juga tertarik untuk menjadikan program Rakit Usaha ini sebagai program nasional.

Hukungan media Kokri SW, Ketua Umum SPS (Serikat Perusaha-an Sarat Kaha) Jawa Tengah, juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Rakit Usaha. "Saya akan mengagjak teman-teman media massa untuk beres-beres semua mengkopos semua aktivitas Rakit Usaha, sehingga penyebaran virus kewirausahaan ini semakin menata di seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Sebagai awal komitmennya ini, Kokri akan mengkopos kegiatan Rakit Usaha ini di Surab-Merdeka dan Wawasan secara rutin setiap dua minggu sekali. "Dengan penataan berita mengenai kegiatan pengembangan UKM ini, maka secara



H Marliyanto

tidak langsung sarat kaha akan menjadi salah satu pilot penggerak kebangkitan wirausaha di Jawa Tengah," tandasnya.

Di samping sarat kaha, kalangan pengusaha di bidang radio siaran PRSSNI Jawa Tengah juga menyatakan dukungannya, dengan memberikan waktu siaran khusus untuk menginformasikan kegiatan rakit usaha ini.

Melalui Kadu kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah, program ini akan mampu diimplementasikan hingga ke pelosok-pelosok, dengan menggunakan radio siaran yang ada di daerah-daerah.

Pada penutupan acara deklarasi ini, pihak Kadu Jawa Tengah juga akan menyerahkan secara simbolis 12.000 buku kewirausahaan kepada siswa-siswa di Jawa Tengah. ■

Perikanan: Peluang Usaha yang Prospektif

6. Perhatian terhadap sektor perikanan dan kelautan meningkat

Kecenderungan politik nasional yang mulai memperhatikan potensi kelautan, termasuk di dalamnya kegiatan perikanan, merupakan keuntungan lain dalam memilih usaha perikanan. Kecenderungan tersebut antara lain dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada kabinet pemerintahan di era reformasi yang secara khusus menangani pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia. Penanganan kelautan untuk pembangunan perikanan diharapkan dapat menggali potensi kelautan yang besar dengan luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh wilayah nusantara.

Dengan kecenderungan politik seperti itu, bila dimanfaatkan secara optimal, bisa menjadi salah satu keuntungan pada bisnis perikanan. Keuntungan yang bisa diambil adalah pada aspek hukum (legal), permodalan, keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya.

E. Kebijakan Pemerintah di Sektor Perikanan

Payung politik sangat dibutuhkan dalam pengembangan sektor perikanan, antara lain berupa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, dan produk hukum lainnya. Salah satu bentuk keamanan politik untuk membangun sektor perikanan dan kelautan adalah dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani secara khusus pembangunan perikanan di Indonesia. Selain itu, berbagai perundang-undangan telah dikeluarkan untuk memberi payung hukum bagi penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan perikanan.

Pelaku dan calon pelaku agribisnis perikanan membutuhkan informasi mengenai kebijakan (aspek legal) pembangunan dan pengembangan sektor perikanan; usaha perikanan dan perizinannya; tata ruang; agraria dan lingkungan; kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan perekonomian; peraturan dan pungutan; penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing; serta kebijakan lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan kegiatan perikanan. Kejelasan dan transparansi mengenai peraturan, perizinan dan kebijakan lain tentang usaha perikanan bisa memberikan kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaku dan calon pelaku agribisnis. Kepastian berusaha merupakan atmosfer bisnis yang penting bagi pengembangan agribisnis perikanan.

Pengembangan agribisnis perikanan dalam rangka merebut peluang usaha di bidang perikanan membutuhkan pemahaman tentang aspek legal yang terkait, baik secara langsung maupun tidak. Pemahaman yang baik tentang aspek tersebut dapat menuntun pelaku maupun calon pelaku agribisnis perikanan dalam meniti langkah-langkah hukum pendirian maupun pelaksanaan agribisnis perikanan secara efektif dan efisien. Berikut disajikan daftar beberapa kebijakan pemerintah untuk sektor perikanan dan kebijakan lainnya yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah.
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA).
15. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan.

Perikanan: Peluang Usaha yang Prospektif

16. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budi Daya Laut di Perairan Indonesia.
17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha.
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha (Penyempurnaan). Izin Usaha Perikanan (IUP).
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budi Daya Laut di Indonesia.
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan.
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir.
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (*Skill Development Fund*) Tenaga Kerja Indonesia.
25. Peraturan Daerah (Perda).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Kebijakan tersebut menyangkut pembangunan dan pengembangan perikanan (kebijakan nomor 1, 17, 21, 23, dan 28), usaha perikanan dan perizinannya (nomor 3, 4, 13, 14, 15, 19, 20, 22, dan 28), tata ruang, agraria dan lingkungan (nomor 2, 8, 10, 11, 24, dan 28), pemerintahan dan pungutan yang terkait (nomor 5, 6, 7, 9, 12, 16, 25, 26, dan 28), serta tenaga kerja (nomor 18, 27, dan 28) yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan kegiatan perikanan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan

Sistem Agribisnis Perikanan

Agribisnis perikanan didefinisikan sebagai kegiatan usaha atau bisnis dengan komoditas berupa ikan dan produk olahannya serta barang dan jasa pendukung lainnya. Sebagai suatu bisnis, kegiatan perikanan selalu berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*). Kegiatan agribisnis perikanan mencakup produksi komoditas perikanan, pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, serta pendukung lainnya. Subsistem proses produksi merupakan kegiatan *on farm*, sedangkan komponen lainnya merupakan kegiatan *off farm*. Kegiatan *on farm* perikanan adalah perikanan tangkap dan akuakultur. Kegiatan *off farm* mencakup pengadaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budi daya, pengolahan perikanan, serta pemasaran hasil perikanan. Terdapat kaitan yang saling mempengaruhi antarkomponen kegiatan, dari hulu hingga hilir sehingga membentuk suatu sistem, yaitu sistem agribisnis perikanan. Dalam buku ini setiap komponen agribisnis disebut subsistem agribisnis.

Pemahaman terhadap sistem agribisnis tersebut secara komprehensif oleh pelaku agribisnis perikanan bisa memperbesar peluang keberlanjutan usaha secara sehat dan menguntungkan. Setiap subsistem agribisnis bisa berupa usaha mandiri yang tidak ada hubungan kepemilikan dengan

1. Subsistem pengadaan sarana dan prasarana produksi

Berikut ini adalah uraian subsistem pengadaan sarana dan prasarana produksi pada usaha akuakultur dan perikanan tangkap. Pengolahan perikanan merupakan usaha *off farm* dari kedua kegiatan *on farm* tersebut sehingga menjadi subsistem tersendiri dari sistem agribisnis perikanan.

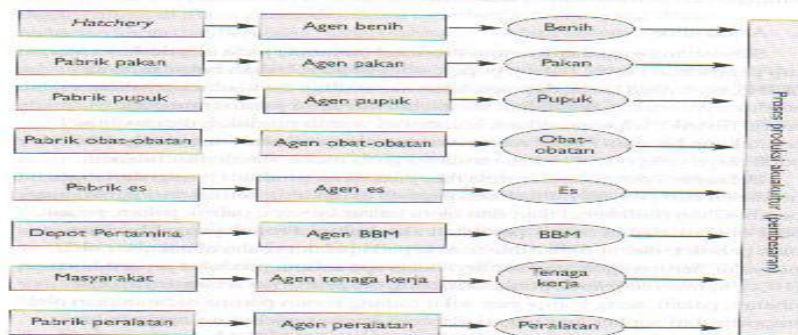
a. Akuakultur

Subsistem pengadaan sarana produksi (saprodi) pada akuakultur mencakup pengadaan benih, pakan, pupuk, obat-obatan, bahan bakar minyak (BBM), es, tenaga kerja, dan peralatan akuakultur. Sementara prasarana produksi mencakup pemilihan lokasi, infrastruktur jalan (transportasi), energi (listrik), telekomunikasi, konstruksi wadah produksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pakan merupakan sarana produksi yang mengambil porsi biaya yang relatif tinggi, terutama pada usaha akuakultur intensif.

Subsistem pengadaan sarana dan prasarana produksi terdiri dari produsen dan penyalur. Produsen saprodi akuakultur terdiri dari perusahaan pembenihan (*hatchery*) ikan dan biota kultur lainnya, pabrik pakan, pupuk, obat-obatan, es dan pabrik peralatan akuakultur. Produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut didistribusikan kepada pelaku usaha akuakultur oleh penyalur berupa agen atau suplier. Beberapa sarana produksi seperti hormon (HCG/*human chorionic gonadotrophin*, *ovaprim*, dan sebagainya) obat-obatan, pakan, serta komponen suku cadang mesin pompa didatangkan oleh importir dari suplier luar negeri. Saprodi impor tersebut mungkin belum diproduksi di Indonesia atau memiliki mutu lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif sehingga lebih diminati oleh pengusaha lokal dalam memproduksi produk akuakultur.

Penyalur benih, pakan, obat-obatan, dan BBM, masing-masing disebut agen penyalur (suplier) benih, agen pakan, agen obat-obatan, agen pupuk, dan agen BBM. Penyalur ini terdiri dari agen berskala besar, menengah, dan kecil yang berfungsi menyalurkan saprodi akuakultur hingga sampai di lokasi sentra produksi secara efisien dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga atau prinsip 4T.

Benih dan pakan, sebagai contoh, masing-masing dihasilkan oleh usaha *hatchery* dan pabrik pakan yang dalam penyalurannya masing-masing menggunakan agen benih dan pakan. Subsistem agribisnis proses produksi yang menggunakan benih dan pakan sebagai *input* produksi adalah usaha pembesaran (*grow out*) yang memproduksi ikan ukuran konsumsi, seperti di kolam, tambak, dan KJA. Aliran barang, berupa benih dan pakan, dari produsen (*hatchery* dan pabrik pakan) ke agen penyalur hingga ke subsistem proses produksi (usaha pembesaran) diusahakan dalam kecepatan yang



Pengadaan sarana produksi usaha akuakultur. Melibatkan pabrik atau perusahaan manufaktur dan agen penyalurnya

ASPEK PRODUKSI PERIKANAN

Seperti halnya bisnis lain, bisnis perikanan di dalamnya terdapat aspek produksi. Ini karena dalam bisnis perikanan terjadi sebuah usaha untuk menghasilkan sebuah komoditas. Oleh karena itu, aspek produksi sangat memerlukan kegiatan manajemen agar dapat mengarahkan usaha produksi sehingga memperoleh hasil yang terbaik. Selain itu, bisnis perikanan sifatnya cukup kompleks sehingga memerlukan pemikiran yang cermat. Kecermatan mengelola usaha perikanan perlu dilakukan, mulai dari persiapan produksi dan saat proses produksi itu berlangsung. Untuk lebih jelasnya, pada bagian ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek produksi.

A. Persiapan Produksi

Sebelum usaha perikanan dimulai, segala sesuatunya perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak ada kekhawatiran dan penyesalan saat usaha sudah berjalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain perencanaan

1. Perencanaan produk

Jenis ikan yang akan diproduksi perlu dipertimbangkan dan ditentukan terlebih dahulu. Jenis ikan yang dipilih hendaknya dapat memenuhi selera pasar dengan baik dan disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Hasil produksi ikan yang memenuhi selera pasar akan lebih memudahkan pemasaran sehingga tidak ada kekhawatiran ikan tidak terjual.

ikan tidak terjual.

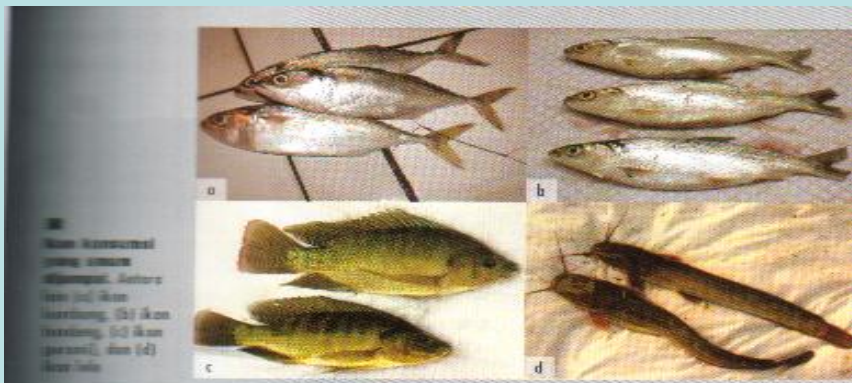
Di pasaran terlihat bahwa produk yang disenangi atau diperlukan konsumen tidak hanya satu jenis saja, tetapi bermacam-macam. Oleh karenanya, pemilihan produk dapat dilakukan pada satu atau beberapa jenis ikan saja, tidak perlu semuanya. Untuk memilih jenis ikan, diadakan seleksi dengan cara meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jenis (yang dipilih) tersebut.

Faktor-faktor yang diperlukan dalam memilih jenis produk antara lain, kegunaan, jumlah permintaan pasar, kemungkinan pengembangan, potensi penjualan, persaingan, distribusi, faktor budi daya, dan umur panen. Gabungan faktor-faktor ini menunjukkan profil ikan yang sesungguhnya. Kelemahan atau kekuatan yang timbul bila memproduksi ikan tersebut akan terlihat.

Secara umum, komoditas ikan yang siap dijual dibagi menjadi dua, yaitu ikan konsumsi dan ikan hias. Beberapa jenis ikan yang umum dijumpai di pasar lokal dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. JENIS-JENIS IKAN YANG UMUM DIJUMPAI DI PASAR LOKAL

Jenis Komoditas	Air Tawar	Air Laut	Air Payau
Ikan Konsumsi	Tawes	Tongkol	Udang galah
	Ikan mas	Seiur	Udang windu
	Gurame	Tenggiri	Bandeng
	Lele	Kembung	Belanak



Lampiran Tabel 1

Jenis Komoditas	Air Tawar	Air Laut	Air Payau
Ikan Hias	Kerang	Bandeng	
	Nila	Udang	
	Padu	Cumi	
	Bawal	Kakap	
	Platy	Kepe	
	Cupang	Monalisa	
	Marvis	Balung	
	Mas Koki	Kakatua	
	Black Molly	Apollo	

Selain jenis-jenis ikan di atas, masih ada komoditas non-ikan yang masih termasuk dalam bidang perikanan. Jenis-jenis tersebut antara lain sebagai berikut.

- Golongan kerang, seperti
 - kapak (*Pinna bicolor*)
 - kimah (*Tridocna squamosa*)
 - kipas-kipas (*Amusium pleuronectes*)
 - tiram tembakau (*Spondylus duccalis*)
 - tiram (*Ostrea*)
 - cocor bebek (*Brachiodontes bilocularis*)
 - kerang enak (*Cardium unedo*)
 - kerang mutiara (*Pinctada margarifera*)



pengangkutan sehingga akan terjadi penambahan biaya operasional. Tidak jarang suatu lokasi harus dibuatkan sarana jalannya terlebih dahulu karena sangat sulit dijangkau.

1. Harga tanah

Perlu dicari lokasi dengan harga atau sewa tanah yang ringan. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pengembangan usaha di masa yang akan datang.

2. Sarana listrik dan irigasi

Listrik sangat diperlukan dalam menjalankan usaha perikanan. Selain untuk sarana penerangan, listrik diperlukan untuk menjalankan sarana elektronik lain, seperti pompa dan blower. Sementara sarana irigasi mutlak diperlukan, mengingat ikan merupakan organisme yang memerlukan sirkulasi atau pergantian air. Selain itu, dalam menjalankan usaha perikanan non-budi daya, air sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan dan untuk aktivitas pencucian sarana lain.

dan untuk usaha ...

b. Aspek iklim

Aspek iklim mempengaruhi keberhasilan budi daya perikanan. Umumnya bisnis perikanan tergantung pada faktor alam. Misalnya, curah hujan mempengaruhi sumber air bila curah hujannya sedikit, tentunya daerah tersebut kurang ideal untuk suatu usaha perikanan. Demikian juga sinar matahari berpengaruh terhadap kemampuan hidup dan berkembang biak ikan karena matahari mempengaruhi suhu rata-rata harian. Oleh karena itu, hendaknya jenis ikan yang akan dibudidayakan disesuaikan dengan iklim di suatu daerah.

perikanan ...

c. Aspek agronomis

Cakupan aspek agronomis antara lain topografi, lokasi, jenis tanah, dan kondisi tanah, serta jenis perairan yang ada di lokasi tersebut. Untuk lokasi budi daya air payau dan laut, kadar salinitas juga ikut mempengaruhi jenis ikan. Misalnya pada tambak. Tambak yang letaknya jauh dari pantai dan dekat sungai

c. Aspek agronomis

Cakupan aspek agronomis antara lain topografi, lokasi, jenis tanah, dan kondisi tanah, serta jenis perairan yang ada di lokasi tersebut. Untuk lokasi budi daya air payau dan laut, kadar salinitas juga ikut mempengaruhi jenis ikan. Misalnya pada tambak. Tambak yang letaknya jauh dari pantai dan dekat sungai

mempunyai salinitas rendah. Sementara tambak yang dekat dengan pantai dan sungai mempunyai salinitas sedang. Kedua jenis tambak tersebut cocok untuk tempat memelihara ikan bandeng atau udang karena pengeringannya mudah dilakukan sehingga mudah dipupuk. Bila menggunakan tambak yang dekat sekali dengan pantai, kadar salinitasnya tinggi dan pengeringannya sulit sehingga tidak cocok untuk usaha bandeng dan udang.

Meskipun terlihat sepele, topografi tetap harus diperhatikan. Bila tidak sesuai, perkembangan ikan akan terganggu. Misalnya, ikan akan kekurangan nafsu makan bila hidup di dataran tinggi (suhu terlalu dingin).

Dalam memilih lokasi, penting sekali memperhatikan faktor pencemaran. Perlu diperhatikan ada tidaknya industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat merusak sumber air di sekitar lokasi. Bila kondisi airnya tercemar akan mengganggu pertumbuhan ikan walaupun telah menggunakan benih unggul. Selain itu, kandungan limbah yang terdapat pada ikan juga akan membahayakan orang yang mengonsumsinya.



■ Penentuan lokasi tambak. Penting untuk menentukan jenis komoditas yang akan dipelihara

Selain mempertimbangkan ketiga aspek di atas, perlu juga melihat aspek lingkungan, sosial budaya masyarakat di sekitar lokasi, dan kebijaksanaan pengembangan usaha dari pemerintah. Masyarakat di sekitar lokasi usaha perikanan sebaiknya mendukung usaha yang dijalankan dan berorientasi terhadap bisnis. Adanya kemungkinan kompetisi dengan pengusaha setempat juga perlu dipertimbangkan.

3. Perencanaan standar produksi

Pengusaha yang berpikiran maju tidak hanya sekadar mementingkan jumlah produksi saja, tetapi juga mengutamakan kualitas produksinya. Hal ini sangat berperan dalam menentukan segmen pasar. Bila suatu produk dilempar ke pasaran maka produk dengan kualitas terbaik yang akan lebih banyak diminati. Dengan demikian, secara otomatis harganya juga akan lebih baik.

Bila kita merencanakan usaha untuk jangka waktu lama dan tidak terbatas, usaha menjaga kualitas produk merupakan langkah yang harus selalu dipertahankan. Hal ini penting untuk menjaga penilaian mutu dari konsumen.

■
Standarisasi
hasil sialat.
Penting untuk
menjaga mutu
produksi



Usaha yang berorientasi ke pasaran luar negeri atau ekspor dibutuhkan kualitas produk yang lebih teliti lagi. Negara yang dituju atau importir biasanya telah menentukan standar produksi sehingga hanya produk yang memenuhi persyaratan saja yang diterima.

Usaha untuk menghasilkan produk perikanan sesuai standar yang diharapkan memang tidak mudah. Namun, dengan imbalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan harga biasa, tentunya usaha kita tidak menjadi sia-sia.

- Golongan kepiting, misalnya
 - rajungan hijau
 - rajungan batik
 - rajungan angina
 - rajungan karang
 - kepiting (*Scylla serrata*)
- Golongan teripang, seperti
 - teripang ular mata
 - teripang hitam
 - teripang pasir atau kapur
 - teripang merah
 - teripang raja
 - teripang batu
- Ubur-ubur
- Cumi-cumi
- Keong

2. Perencanaan lokasi usaha

Lokasi yang tepat akan mempunyai pengaruh positif bagi kelangsungan usaha. Oleh karena itu, dalam penentuan lokasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu, juga perlu melihat prospek lokasi tersebut pada masa yang akan datang. Lokasi yang dipilih sebaiknya dapat mendukung untuk mendatangkan keuntungan terbesar. Selain itu, lokasi yang akan digunakan sangat berpotensi tinggi untuk kegiatan usaha.

Perencanaan lokasi hendaknya dilakukan sebaik-baiknya. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penentuan lokasi perlu meninjau beberapa aspek seperti berikut.

a. Aspek teknis-ekonomis

Berdasarkan aspek teknis-ekonomis, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari lokasi usaha yang direncanakan, yaitu biaya transportasi, sarana jalan, tenaga kerja, sewa tanah, serta sarana listrik dan irigasi.

❑ Biaya transportasi

Biaya ini menyangkut transportasi, baik itu dari lokasi usaha dengan tempat penyedia bahan produksi, ataupun lokasi usaha dengan tempat pemasaran.

❑ Sarana jalan

Sarana jalan tidak kalah penting. Bila aspek ini tidak diperhatikan, terkadang bisa menaikkan biaya pemasaran atau biaya